

ABSTRAK

Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya dapat diukur atau dilihat dari adanya kebijakan pemerintah di tingkat pusat, akan tetapi diperlukan dukungan kebijakan setiap pemerintah kabupaten dan kota. PUG merupakan topik yang mengemuka selama lebih dari satu dekade terakhir. Dalam *Millenium Development Goals (MDGs)* yang menjadi kesepakatan dari 189 negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, kesetaraan gender menjadi sasaran ketiga dari delapan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015. Tujuan dalam kegiatan penelitian adalah: 1) Mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang mendukung dan responsif terhadap masalah gender; 2) Mengetahui komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; 3) Mengetahui implementasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang responsif gender.

Lokasi kegiatan penelitian Kajian Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Responsif Gender di Jawa Timur, antara lain: 1) Kota Probolinggo; 2) Kota Kediri; 3) Kabupaten Sidoarjo; dan 4) Kabupaten Nganjuk. Pengambilan data menggunakan perpaduan antara data primer dan data sekunder, yang dilakukan pada instansi pemerintahan di lokasi penelitian. Penentuan sampel dipilih secara *purposive sampling*. Teknik analisis menggunakan analisis multifaktor yang menggabungkan 15 parameter.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari beberapa pejabat pemerintah kabupaten/kota terkait dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, mereka berkomitmen telah melaksanakan PUG, akan tetapi mereka tidak dapat menunjukkan bukti fisik adanya *Gender Budget Statement (GBA)* yang merupakan dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah untuk menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur hendaknya mempunyai komitmen dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dengan cara membuat dokumen berupa *Gender Budget Statement (GBA)* agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan terkait bernuansa kesetaraan gender. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur hendaknya benar-benar mengimplementasikan kebijakan yang responsif gender dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas PUG yang dapat dilakukan mulai dari proses perencanaan hingga pengawasan program. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan IPG di Jawa Timur, sehingga tujuan dari MDG's dapat tercapai dalam waktu yang relatif cepat.

Kata Kunci : Kebijakan, Gender

ABSTRACT

The success of national development can not only be measured or seen from any government policies at the national level, but needed the support of the policy of every government district and the city. PUG is a topic that surfaced over the last decade. In the Millennium Development Goals (MDGs), which became the agreement of 189 countries in the United Nations (UN), which starts in September 2000, gender equality became the third target of eight goals to be achieved by 2015. The purpose of the research activities are: 1) Knowing the policies that have been issued by the district / city that supports and responsive to gender issues; 2) Knowing the commitment of district / city governments in planning and implementation of gender responsive budgeting; 3) Know the implementation of government policies districts / cities that are responsive to gender.

The location of research activities Assessment Policy Implementation Government of Regency / City Gender Responsive East Java, among other things: 1) Kota Probolinggo; 2) Kediri; 3) Sidoarjo regency; and 4) Nganjuk. Retrieving data using a blend of primary data and secondary data, which is performed on any public authority in research location. The samples were selected by purposive sampling. Using analytical techniques that incorporate multifactor analysis of 15 parameters.

Based on information obtained from several officials of district / city governments involved in the implementation of the planning and budgeting of gender-responsive, they committed has implemented PUG, but they can not show physical evidence of the existence of Gender Budget Statement (GBA), which is a document of accountability gender specific compiled government agencies to show his willingness to perform activities based on gender equality and allocate budgets for these activities. District / city in East Java province should have a commitment in planning and implementation of gender responsive budgeting in a way to make documents such as the Gender Budget Statement (GBA) that activities carried out by the relevant government nuanced gender equality. District / city in East Java province should actually implement gender responsive policies by increasing the efficiency and effectiveness of the PUG to do, from planning to monitoring program. It aims to improve the IPG in East Java, so that the objectives of the MDGs can be achieved in a relatively quick time.

Keywords: Policy, Gender